

PERJUANGAN ERNEST FRANCOIS EUGENE DOUWES DEKKER DARI POLITIK MENUJU PENDIDIKAN 1913-1941

Akhmad Bima Firmansyah
084284205

ABSTRAK

Perjuangan E.F.E. Douwes Dekker melalui organisasi politik *Indische Partij* yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 tetapi tidak dapat badan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda mengacu pada *Regerings-Reglement* pasal 111 tahun 1854. E.F.E. Douwes Dekker tidak dapat ikut campur dalam ranah politik Pemerintahan karena *Indische Partij* tidak memiliki badan hukum di Hindia Belanda. selain itu, dalam pergerakannya, E.F.E. Douwes Dekker diasingkan karena tulisannya yang memberi selamat kepada Soewardi dan Tjipto sebagai pahlawan atas kritikan pedas terhadap peringatan seratus tahun Belanda bebas dari Prancis. Sekembalinya Douwes Dekker dari masa pengasingan, Douwes Dekker masuk dalam organisasi *Insulinde* yang dirubah namanya menjadi *Nationaal Indische Partij* tetapi organisasi ini akhirnya dibubarkan oleh Pemerintahan dengan mengacu pada RR pasal 111 tahun 1854. Adanya larangan tentang organisasi politik. Pada organisasi *Indische Partij* akhirnya berpindah bidang dalam perjuangannya, peralihan perjuangan dari politik ke ranah pendidikan. Pada ranah pendidikan E.F.E. Douwes Dekker dan Istrinya Petronella Mossel mendirikan *Ksatrian Instituut*. Perkembangan *Ksatrian Instituut* sangat baik dengan bukti dibukanya sekolah *Ksatrian Instituut* diberbagai tempat.

Kata Kunci: E.F.E. Douwes Dekker, politik, pendidikan

ABSTRACT

Struggle E.F.E. Douwes Dekker through Partij Indische political organization which was established on December 25, 1912 but not a legal entity by the Dutch Government refers *Regerings-Reglement* Article 111 in 1854. E.F.E. Douwes Dekker can not interfere in the political sphere as *Indische Partij* Government does not have a legal entity in the Netherlands Indies. besides, in the movement, E.F.E. Douwes Dekker was exiled because of his writing to congratulate Soewardi and Tjipto as a hero on criticism of the hundredth anniversary of the Dutch independent from France. Upon his return from the exile Douwes Dekker, Douwes Dekker in the organization renamed *Insulinde* the *Nationaal Indische Partij* but the organization was finally dissolved by the Government with reference to Article 111 RR 1854. The ban on political organization on the organization *Indische Partij* eventually move the fields in the struggle, the struggle of the political transition to the realm of education. In the realm of education E.F.E. Douwes Dekker and his wife Petronella Mossel establish *Ksatrian Instituut*. Developments *Ksatrian Instituut* excellent school with evidence of the opening of the Institute *Ksatrian* various places.

Key Words: E.F.E. Douwes Dekker, Politic, Education

A. PENDAHULUAN

Masa pergerakan nasional Indonesia (1900-1945) ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Pada tanggal 20 Mei 1908 lahir organisasi pertama di Indonesia, yakni Budi Utomo (BU). Organisasi kedua ialah Serikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi pada tahun 1911. H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun 1912 SDI menjadi Serikat Islam (SI). Organisasi SI lebih luas anggotanya tidak hanya para pedagang saja, melainkan semua elemen masyarakat. Beberapa aspek perjuangan terkumpul menjadi satu di SI, sehingga ada yang menamakan bahwa SI merupakan *gerakan nationalistisch-religius- demokratisch-ekonomisch*. Selain BU dan SI ada satu organisasi lain yaitu *Indische Partij*. Organisasi *Indische Partij* lahir pada tanggal 25 Desember 1912 yang dibentuk oleh Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (E.F.E. Douwes Dekker) yang bertujuan untuk

mempersatukan semua golongan sebagai persiapan untuk kehidupan merdeka. *Indische Partij* merupakan organisasi yang secara tegas menyatakan berpolitik. E.F.E. Douwes Dekker mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum tetapi ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda melalui surat keputusan tanggal 4 Maret 1913 dengan alasan perkumpulan politik mengancam keamanan dan ketertiban umum dengan mengacu pada pasal 111 *Regeringreglement* (Peraturan Pemerintah) tahun 1854. Pasal RR 111 tidak memberikan izin bagi pendirian organisasi berasaskan politik di Hindia Belanda.

Setelah mengetahui keputusan penolakan legalitas berdirinya *Indische Partij*, pada tanggal 5 Maret 1913 pengurus organisasi *Indische Partij* mengadakan pembicaraan mengenai langkah lebih lanjut yang harus ditempuh. Dalam rapat diambil keputusan untuk mencabut pasal 2 dari Anggaran Dasar yang berhubungan

dengan maksud utama perkumpulan *Indische partij* karena pasal tersebut merupakan pokok permasalahan. Isi pasal 2 dari Anggaran Dasar dirumuskan sebagai berikut: 1) Untuk membangun patriotisme semua bangsa Hindia kepada tanah air yang telah memberi lapangan hidup. 2) Menganjurkan kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan. 3) Memajukan tanah air Hindia. 4) Mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.

Langkah selanjutnya pengurus *Indische Partij* mengajukan permohonan pengakuan badan hukum yang kedua kalinya kepada pemerintah dengan perubahan Anggaran Dasar. Akan tetapi, dengan cepat pula pemerintah memberi jawaban yaitu penolakan yang kedua kalinya sebagaimana tercantum dalam surat keputusan tertanggal 11 Maret 1913. Kegagalan dalam mendapatkan pengakuan pemerintah pada tanggal 31 Maret 1913, membuat pimpinan *Indische Partij* menyatakan keputusan untuk membubarkan partai. Pembubaran partai ini dilakukan pada kongres pertama *Indische Partij* di Semarang pada tanggal 21-23 Maret 1913.

Perjuangan untuk meraih kebebasan melalui jalur politik dirasa sulit dan terus menerus mendapat tekanan dari pemerintah Hindia Belanda, artinya harus ada jalan lain untuk memperjuangkan menuju kemerdekaan. Serangkaian usaha yang dilakukan semata-mata untuk kemerdekaan serta kesejahteraan masyarakat pribumi, langkah selanjutnya bergerak di bidang pendidikan. Perjalanan hidup sosok pejuang E.F.E. Douwes Dekker merupakan sebuah obyek penelitian yang layak dianalisis dalam kajian sejarah.

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahannya adalah: 1). Bagaimana perjuangan Ernest Francois Eugene Douwes Dekker di ranah politik 2). Apa latar belakang perjuangan Ernest Francois Eugene Douwes Dekker dari politik menuju pendidikan. 3). Bagaimana perjuangan Ernest Francois Eugene Douwes Dekker di dunia pendidikan. \ Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut : 1). Mengidentifikasi bagaimana E.F.E. Douwes Dekker mulai meninggalkan kehidupan berpolitik. 2). Menjelaskan faktor-faktor penyebab peralihan pandangan dari politik menuju pendidikan. 3). Mendiskripsikan E.F.E. Douwes Dekker di ranah pendidikan. Untuk mencari jejak sejarah, penulis membutuhkan metode penelitian. Setidaknya terdapat empat tahapan di dalam metode penelitian sejarah yaitu; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

B. PERJUANGAN ERNEST FRANCOIS EUGENE DOUWES DEKKER DI RANAH POLITIK

1. Latar Belakang E.F.E. Douwes Dekker mendirikan Organisasi Politik

Pada tanggal 17 Desember 1911 *De Indische Bond* mengadakan rapat umum di Jakarta dengan E.F.E. Douwes Dekker sebagai pembicara tunggal. Respon positif diterima E.F.E. Douwes Dekker ketika berpidato. Pada tanggal 25 Agustus 1912, *De Indische Bond* mengadakan rapat kembali di Jakarta yang dikunjungi oleh Van Der Poel, Brunsveld van Hulten, dan E.F.E. Douwes Dekker. Berdasarkan berbagai alasan yang

dikemukakan oleh tiga orang tersebut ditanamkan keyakinan untuk memperoleh hasil baik demi kepentingan Hindia, perhimpunan Hindia perlu dirombak arah dan tujuannya ke arah politik. Oleh karena itu, rapat yang diadakan di Jakarta tanggal 25 Agustus 1912 memperoleh hasil pembentukan panitia tujuh untuk membentuk komisi peneliti yang terdiri dari 7 orang, yakni: J.R. Agerbeek, J.D. Brunsverld van Hulten, G.P. Charli, E.C.L. Couvreur, E.F.E. Douwes Dekker, J. van der Poel, R.H. Teuscher.

Panitia tujuh mengambil tindakan untuk menyiapkan berdirinya perhimpunan baru yang lebih baik. Di bawah pimpinan E.F.E. Douwes Dekker mengadakan rapat di Bandung pada tanggal 6 September 1912. Van der Poel membahas keanggotaan perhimpunan baru yang sedang dalam persiapan; Teuscher mengupas hak Hindia Putra atas tanah Hindia; Brunsveld van Hulten mengulas hari depan Hindia Putra dan E.F.E. Douwes Dekker mencurahkan perhatian kepada wajib bersaudara antar semua Hindia Putra. Hindia Putra adalah orang yang dilahirkan, bertempat tinggal dan dikuburkan di tanah air Hindia. Ketika di Yogyakarta seorang pengurus besar *Insulinde* G. Topee menggabungkan diri dengan ketiga pengurus *Indische Partij*. Simpati G. Topee menggabungkan diri pada *Indische Partij* sangat dipahami E.F.E. Douwes Dekker karena mempunyai asas yang sama. Asas partai sangat luas dan menyangkut tentang kepentingan orang yang tinggal di Hindia Belanda maka simpati orang-orang terhadap *Indische Partij* sangat banyak.

Masyarakat Hindia Belanda mengharapkan pemerintah memperhatikan pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Mengharapkan akan adanya kehidupan persaudaraan antara orang-orang Belanda kelahiran Hindia Belanda dan orang-orang Bumiputra. Oleh karena itu, benar-benar diharapkan agar raja Belanda segera mengambil tindakan demi kewibawaan pemerintah dan niat baik pemerintah tidak hilang akibat penerapan politik yang mengutamakan kepentingan Negara induk.

Tujuan *Indische Partij* tidak lain adalah Hindia Merdeka dengan asas kebangsaan Hindia (Indonesia). Persiapan ke langkah pembentukan *Indische Partij* memang sudah lama diadakan melalui pers *De Express* dan majalah *Het Tjidschrift* atas kemauan E.F.E. Douwes Dekker. Bagi orang-orang Budi Utomo nama Douwes Dekker tidak asing lagi karena sejak lahirnya Budi Utomo, E.F.E. Douwes Dekker sebagai wartawan *Bataviaasch Nieuwblad* selalu menyediakan tempat dalam harian untuk propaganda perhimpunan Budi Utomo.

Perhatian dan sambutan partai politik baru semakin hari semakin meluas. Lahirnya *Indische Partij* menjadi pembicaraan di parlemen Belanda, W.H. Vliegen anggota golongan *Sociaal Demokratische Arbeiders Partij* menyinggung *Indische Partij* dalam pidato dan mengucapkan simpati pembelaan terhadap *Indische Partij*. Tanggapan pers Belanda di Hindia Belanda yang memusuhi *Indische Partij* menanggapi hal yang berbeda berupa serangan pedas, kotor dan keji sesuai watak pers Belanda terhadap E.F.E. Douwes Dekker. E.F.E. Douwes Dekker memang sengaja berusaha menghancurkan

penjajah lewat pers. Pada tanggal 25 Desember 1912, bertepatan dengan hari Natal diadakan rapat peresmian anggaran dasar *Indische Partij*. Susunan pengurus sebagai berikut: E.F.E. Douwes Dekker sebagai ketua perhimpunan *Indische Partij* sedangkan Dr. Tjipto Mangunkusumo sebagai wakil ketua.

2. Perjuangan *Indische Partij* Untuk Memperoleh Badan Hukum

Pada tanggal 17 September 1912 pengurus besar *Indische Partij* mengadakan pertemuan dengan *Insulinde* pada waktu itu dipimpin oleh Mr. Jeekel. Pertemuan ini menghasilkan peleburan anggota *Insulinde* ke dalam *Indische Partij*. Sebagai suatu kekecewaan, akhirnya pemimpin *Insulinde* mengundurkan diri dan membentuk perhimpunan baru yang bernama *Het Nederlandsh Indische Comite*, tetapi perhimpunan ini tidak dapat berkembang.

Pada tahun 1913 diumumkan rencana pemerintah untuk pembentukan Dewan Perwakilan di Hindia Belanda dengan nama *Koloniale Raad* atau Dewan Jajahan. Baik nama maupun susunan pengurus dewan tidak disetujui oleh masyarakat Bumiputra karena nama *Koloniale Raad* merupakan hinaan terhadap pergerakan nasional. Sudah dapat dipastikan akan membela kaum penjajah dan mengabaikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya *Koloniale Raad* ditentang para nasionalis. Susunan anggota *Koloniale Raad* berjumlah 29 orang dan delapan diantaranya bukan orang Belanda. Delapan orang akan dibagi lagi menjadi lima orang dari golongan priyayi dan tiga orang diantaranya rakyat pribumi.

Kaum nasionalis yang tergabung dari berbagai perhimpunan menolak *Koloniale Raad* dan menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih oleh pemerintah Hindia Belanda seimbang, antara penduduk asing dan penduduk pribumi. Sejak awal E. F. E. Douwes Dekker telah menjadi perhatian khusus pemerintah. Satu hal yang paling ditakuti penguasa kolonial bukan gagasan untuk mencapai kemerdekaan melainkan karena ada dua kelompok penduduk yang bertemu. Kemungkinan bahwa kelompok Indo-Eropa akan membawa pengaruh buruk pada golongan Bumiputra. Kehawatiran lain disebabkan beberapa pengurus Serikat Islam cabang Bandung seperti Soewardi Surjaningrat, Abdoel Moeis dan Akhmad Hassan Wignjadisastra yang ikut terlibat aktif dalam *Indische Partij* dan mungkin akan berpengaruh terhadap penduduk Bumiputra untuk melawan penjajah. Artinya, pemerintah harus hati-hati dalam bertindak.

Pada tanggal 25 Desember 1912, para pimpinan *Indische Partij* yang dipimpin E.F.E. Douwes Dekker bersama Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat menuju Istana Bogor. E.F.E. Douwes Dekker berusaha agar perhimpunan *Indische Partij* mendapatkan pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Hal ini penting agar *Indische Partij* tidak disangka sebagai perkumpulan liar dan meresahkan masyarakat. Ketika melihat permohonan E.F.E. Douwes Dekker untuk pengakuan badan hukum atas *Indische Partij*, pemerintah menugaskan kepada penasihat urusan pribumi yaitu Dr. G.H.J. Hazeu untuk memberikan

keterangan sehubungan dengan E.F.E. Douwes Dekker, *Indische Partij*, dan pengaruhnya pada penduduk Nusantara. Laporan kemudian disusun oleh ajun penasehat pribumi yang bernama D.A. Rinkes tertanggal 16 Januari 1913. Laporan tersebut berisikan tentang latar belakang pribadi E.F.E. Douwes Dekker, gagasan dan cita-cita serta pengaruh dari propaganda terhadap berbagai kelompok penduduk Hindia Belanda.

Berbagai permohonan *Indische Partij* kepada pemerintah seharusnya diberi suatu solusi pada akar permasalahan supaya pemerintah disegani kembali dan tidak mengikuti E.F.E. Douwes Dekker. Antara Hazeu dan Rinkes sepakat bahwa E.F.E. Douwes Dekker dapat dipandang sebagai seorang agitator utama dalam masalah pengajuan badan hukum. Secara prinsip Gubernur Jendral Idenburg setuju dengan pandangan kedua penasehat Hazeu dan Rinkes tetapi Idenburg menolak untuk membiarkan E.F.E. Douwes Dekker untuk melanjutkan perjuangan di perhimpunan. Idenburg mengakui bahwa berbagai teori demokrasi memang berlaku bagi dunia barat tetapi berbeda di Indonesia karena penduduk hidup menurut kelompok dan ras yang terpisah, sehingga tidak dapat diharapkan adanya suatu ruang publik yang bisa dikatakan meniru bangsa Barat.

Pada tanggal 4 Maret 1913, Gubernur Jendral Idenburg secara resmi menolak permohonan pengurus *Indische Partij* untuk memperoleh status badan hukum dengan mengacu pada pasal 111 *Regerings-Reglement* atau Peraturan Pemerintah tahun 1854. Penggunaan pasal cukup membuat pengurus *Indische Partij* terkejut karena pemerintah Hindia Belanda telah lama bermaksud meninggalkan pasal 111 dan akan menggantikan dengan peraturan lain. Setelah mengetahui keputusan penolakan, pada tanggal 5 Maret 1913 E.F.E. Douwes Dekker dan pengurus *Indische Partij* mengadakan pembicaraan mengenai langkah lanjut yang harus ditempuh.

Di dalam rapat tanggal 5 Maret 1913 pucuk pimpinan *Indische Partij* memutuskan untuk mengubah bunyi pasal 2 tentang tujuan *Indische Partij*. Setelah bergantinya anggaran dasar *Indische Partij*, E.F.E. Douwes Dekker menghadap pada Idenburg agar diberi badan hukum atas perhimpunan *Indische Partij*. Surat keputusan tanggal 11 Maret 1913 Gubernur Jendral menolak anggaran dasar *Indische Partij* yang baru. Bunyi penolakan menimbang bahwa perubahan pada pasal 2 anggaran dasar tidak sama sekali bermaksud merubah dasar dan jiwa organisasi. Walaupun kemudian pucuk pimpinan *Indische Partij* beraudiensi kepada Gubernur Jendral Idenburg untuk mengulangi permohonan badan hukum tetapi pemerintah Hindia Belanda tetap pada pendiriannya.

Pada tanggal 13 Maret 1913 pemerintah menjelaskan keputusan penolakan melalui audiensi antara Gubernur Jendral Idenburg dengan E.F.E. Douwes Dekker, ketika itu datang menghadap untuk meminta badan hukum untuk ketiga kalinya. Terhadap pertanyaan E.F.E. Douwes Dekker tentang apakah pemerintah kelak akan memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan, Idenburg menyatakan sambil menggeleng-gelengkan kepala bahwa masalah kemerdekaan Hindia Belanda tidak menjadi soal, tidak dapat dilakukan pertukaran

pendapat tentang kemerdekaan. Maksud dari perkataan Idenburg sebenarnya lebih menekankan bahwa saat membicarakan masalah kemerdekaan bukan wacana yang dapat diperbincangkan secara terbuka. Akan tetapi E.F.E. Douwes Dekker memberi jawaban tersebut sebagai pernyataan *fix* dan tidak dapat diganggu gugat tentang permohonan badan hukum untuk *Indische Partij*. Pada tanggal 31 Maret 1913 pimpinan pusat *Indische Partij* menyatakan keputusan untuk membubarkan partai. Demi kelangsungan perjuangan, baik pendukung *Indische Partij* maupun masyarakat bumiputra yang mendukung kegiatan partai disarankan untuk pindah ke *Insulinde*. Dengan kata lain, jumlah anggota *Insulinde* bertambah seiring masuknya anggota *Indische Partij* ke dalam perhimpunan *Insulinde*. Pergerakan *Indische Partij* tidak akan mati karena ide-ide pertentangan pada Belanda bisa dilakukan melalui perhimpunan *Insulinde*.

C. LANGKAH ERNEST FRANCOIS EUGENE DOUWES DEKKER DARI RANAH POLITIK KE RANAH PENDIDIKAN

1. Kegagalan Perjuangan E.F.E. Douwes Dekker di Ranah Politik

Kegagalan E.F.E. Douwes Dekker dalam ranah politik berawal dari kegagalan memperoleh badan hukum *Indische Partij* pada tanggal 4 Maret 1913 yang ditolak dengan alasan karena organisasi *Indische Partij* berdasarkan politik dan mengancam keamanan umum. Penolakan oleh Gubernur Jendral Idenburg untuk badan hukum suatu partai yang beraliran politik sudah ada aturan yang menerangkan tentang pelarangan partai politik di Hindia Belanda. Aturan-aturan pemerintah Hindia Belanda mengacu langsung pada undang-undang di Belanda. Gubernur Jendral Idenburg secara resmi menolak permohonan badan hukum dengan mengacu pada pasal 111 Peraturan Pemerintah atau *Regerings-Reglement* tahun 1884. Pasal tersebut tidak memberi izin untuk organisasi yang berdiri di Hindia Belanda yang berasaskan politik sebagai dasar perjuangannya.

Bergabungnya E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Surjaningrat ke dalam *Insulinde* mengokohkan perjuangan dalam bidang politik. Pada tahun 1919 *Insulinde* berubah nama menjadi *Nationaal Indische Partij* yang diketuai oleh Soewardi Surjaningrat yang bertempat di Semarang. *Nationaal Indische Partij* tidak mendapat sambutan oleh anggotanya karena kaum terpelajar Hindia Belanda masih takut menyatakan terus terang keinginan untuk merdeka atas Belanda, sedangkan kaum Belanda masih ingin mempertahankan hak istimewa sebagai bangsa Belanda dan tidak senang berdampingan dengan bangsa Hindia Belanda demi kemerdekaan yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir perjuangan.

Pada waktu itu penduduk Hindia Belanda terbagi dalam tiga golongan, yakni: Golongan Eropa atau Golongan Belanda, Golongan Bumiputra atau penduduk asli Hindia Belanda dan Golongan Timur Asing atau keturunan para pedagang Arab dan Cina. Golongan Belanda menurut aturan-aturan Pemerintah karena golongan ini mempunyai hak-hak istimewa lebih dari golongan Bumiputra dan golongan Timur Asing. Sudah

wajar apabila golongan Belanda merasa golongan tertinggi dari ketiga golongan. Golongan Belanda membentuk perkumpulan sendiri yang semata-mata memperhatikan kepentingan golongan Belanda yang cinta tanah air. Kebanyakan anggota *Nationaal Indische Partij* ditinggalkan dari Golongan Belanda untuk masuk pada perhimpunan *Indo Europeesch Verbond* atau bila disingkat menjadi *IEV*. Pihak pemerintahan Hindia Belanda tetap mengawasi gerak-gerik tiga serangkai yang telah kembali dari pengasingan.

Perhimpunan *Insulinde* tidak pernah mendapat peringatan dari pemerintahan Hindia Belanda meskipun asas dan tujuan sama dengan *Indische Partij*. Setelah dimasuki tiga serangkai yakni E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Surjaningrat dianggap perhimpunan yang membahayakan keamanan dan ketentraman. Pada hakekatnya dianggap berbahaya bukan karena asas dan tujuannya tetapi yang membahayakan adalah tiga tokoh yang menggerakkan perhimpunan *Insulinde* yang berubah nama menjadi *Nationaal Indische Partij*. E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Surjaningrat menjalankan politik kontra pemerintah atau anti kolonial.

Berkecimpung dalam *Nationaal Indische Partij* E.F.E. Douwes Dekker juga mengeluarkan sebuah majalah yang diberi nama *De Beweging* dan *Nieuwe Expres* atau *Expres Baru*. E.F.E. Douwes Dekker kemudian menggerakkan pemogokan pabrik tembakau di Surakarta. Pemogokan berhasil ketika buruh pabrik menerima tambahan gaji dan dikurangi jam kerjanya.

E.F.E. Douwes Dekker Penuh semangat menyebarluaskan cita-cita untuk mengusir penjajahan Belanda serta menginginkan kemerdekaan di akhir tujuan perjuangannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila E.F.E. Douwes Dekker sering dipanggil oleh Dinas Rahasia Pemerintah (*Politieke Inlichtingen Dienst*). Tulisan dan tindakan E.F.E. Douwes Dekker mendapat teguran-teguran keras dari pemerintah Hindia Belanda karena dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Akibatnya, E.F.E. Douwes Dekker dipenjarakan di penjara Semarang. Demikian pula pada tahun 1921 *Nationaal Indische Partij* dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena perhimpunan tersebut dianggap membahayakan dan mengganggu ketertiban umum.

2. Latar Belakang Perjuangan E.F.E. Douwes Dekker dari Politik menuju Pendidikan

Setelah NIP atau *Nationaal Indische Partij* resmi dilarang oleh pemerintah Belanda maka E.F.E. Douwes Dekker meninggalkan Semarang menuju Cibadak keresidenan Sukabumi. Cibadak merupakan tempat sederhana bagi E.F.E. Douwes Dekker. E.F.E. Douwes Dekker beternak ayam untuk membiayai hidupnya sendiri, disamping beternak ayam E.F.E. Douwes Dekker juga menjadi pengusaha anjing herder dan bahkan mendirikan perkumpulan penggemar anjing herder pada tahun 1925, memberikan kursus anatomi anjing dan terkenal sebagai peternak anjing herder terkemuka.

Selain beternak ayam dan anjing herder, E.F.E. Douwes Dekker juga tetap melakukan propaganda di Jawa Barat. Berbeda dengan pada waktu di Jawa Tengah,

propaganda E.F.E. Douwes Dekker kurang mendapat sambutan oleh masyarakat Jawa Tengah. Meskipun berpisah dari dua kawannya yaitu Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Surjaningrat, E.F.E. Douwes Dekker tetap semangat untuk memperjuangkan Hindia Belanda untuk meraih kemerdekaan yang di cita-cita masyarakat Hindia Belanda yang tertindas.

Usia yang sudah tidak muda lagi yaitu berumur 46 tahun dan organisasi yang tak kunjung mendapatkan badan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda maka E.F.E. Douwes Dekker mengambil langkah lain untuk perjuangan menuju Hindia Belanda yang merdeka. E.F.E. Douwes Dekker memilih perjuangan di ranah pendidikan.

Sejak perkembangan industri, muncul berbagai lembaga pendidikan modern tingkat menengah dan tinggi dengan sistem pendidikan yang bersifat massal namun masih bernuansa *diskriminasi*, seperti sekolah khusus untuk anak-anak Eropa misalnya *Europese Lagere School* (ELS), untuk golongan Timur-Asing *Hollands-Arabische School* (HAS) dan *Hollands-Chinesche School* (HCS) untuk golongan anak-anak China. ELS, HAS dan HCS adalah setingkat dengan Sekolah Dasar. Sedangkan untuk golongan bumiputra dibedakan menjadi dua golongan yaitu kaum bangsawan atau priyayi (*eerste school*) dimulai tahun 1897 dan kelompok rakyat pribumi atau rakyat jelata (*tweede school*) dimulai tahun 1914. Orang Jawa mengenalnya dengan nama Sekolah Ongko Siji dalam bahasa Belanda *Eerste School* yaitu *Hollandsch Inlandsch School* (HIS) yang setingkat dengan Sekolah Dasar sedangkan Sekolah Ongko Loro (*Tweede School*) hanya *Volk School* atau Sekolah Rakyat dengan masa studi 2 tahun dengan bahasa pengantar bahasa daerah dan pelajaran sekedar belajar membaca dan berhitung. Setelah belajar di HIS kemudian melanjutkan di *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO) yang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama dan *Algemeenen Middlebare School* (AMS) yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Kesenjangan sosial antara anak-anak pribumi dengan keturunan Belanda dalam memperoleh ilmu melalui pendidikan sangat diperhatikan oleh E.F.E. Douwes Dekker sebagai celah untuk melakukan perjuangan di ranah pendidikan. Pembelajaran dapat dilakukan berbagai cara, seperti Budi Utomo yang melakukan pergerakannya melalui diskusi di STOVIA dan *Indische Partij* yang melakukan banyak propaganda melalui media cetak *De Expprees*, *Het Tijdschrift*, *De Beweging* dan *Nieuwe Exprees*. Propaganda-propaganda yang dilancarkan oleh E.F.E. Douwes Dekker adalah sebuah pemikiran dan pembelajaran tentang makna nasionalisme yang dilakukan untuk tujuan akhir yaitu Hindia Belanda memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan yang tak mudah.

D. PERJUANGAN E.F.E. DOUWES DEKKER DI RANAH PENDIDIKAN

Ksatrian Instituut

Pada tahun 1923 muncul Instituut Pengajaran Priangan dari Perkumpulan Pengajaran Rakyat di Bandung. Tujuan sekolah ini adalah untuk memberi kesempatan belajar kepada anak-anak Hindia Belanda.

Rencana pelajaran sekolah *Ksatrian Instituut* disesuaikan dengan *Europese Lagere School* (ELS). Dalam tatanan bahasa yang digunakan untuk proses pengajaran, Douwes Dekker sebenarnya tidak menginginkan bahasa Belanda dijadikan bahasa pengajaran namun bahasa Belanda masih tetap penting untuk mengetahui sisi kolonial dan dari sisi ekonomi. Dalam salah satu surat Douwes Dekker kepada kawannya di Karawang, Douwes Dekker menulis tentang kejadian yang terpenting di sekolah adanya rasa harga diri manusia dan kepercayaan kepada diri sendiri diajarkan sebagai bagian pendidikan untuk membina watak dan batin sekolah akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh penjajah.

E.F.E. Douwes Dekker siap mengabdikan jiwa dan raga untuk kemajuan pendidikan di Hindia Belanda. Hal ini terbukti sejak November 1924 lembaga pendidikan Priangan diubah menjadi yayasan yang bernama *School Vereeniging Het Ksatrian Instituut* atau sering disingkat *Ksatrian Instituut*. *Ksatrian Instituut* (dalam bahasa Indonesia berarti Sekolah ksatria) berkembang baik dan mempunyai murid lebih dari 200 siswa. Demi kepentingan pendidikan para murid diharapkan menjadi *kader* perjuangan Hindia Belanda di masa yang akan datang, maka E.F.E. Douwes Dekker berhenti beternak ayam ras dan anjing herder. E.F.E. Douwes Dekker hanya memusatkan perhatiannya pada pendidikan di Sekolah. *Ksatrian Instituut* dipindahkan dari Bandung ke Kebonjati dan pimpinan teknis sekolah diserahkan pada istri Douwes Dekker. Pada tanggal 1 Juli 1926 *Ksatrian Instituut* yang baru dengan pengurus-pengurus baru antara lain E.F.E. Douwes Dekker, G.M.G. Douwes Dekker, P.Ph.P. Westerloo, J.E. Folkens, Tjipto Mangunkusumo, A. Coomans dan P.E. Dakter. Selain susunan pengurus yang baru, pada tanggal 16 November 1926 Yayasan Ksatrian mendapatkan surat persetujuan pengakuan sebagai badan hukum dari Gubernur Jendral Hindia Belanda serta untuk susunan pengurus Yayasan Perguruan *Het Ksatrian Instituut* sesuai dengan bunyi pasal 7 Anggaran Dasar terdiri dari seorang Ketua, Seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.

Jabatan sebagai ketua yayasan dipegang oleh Douwes Dekker dan istrinya yang bernama Johanna Petronella Douwes Dekker bertindak sebagai Sekretaris. Pada mulanya Sekolah Ksatria hanya berupa Sekolah Dasar yang sederhana. Tujuan sekolah itu adalah untuk memberi kesempatan belajar yang lebih baik dan lebih luas bagi rakyat Hindia Belanda.

Pelaksanaan pengajaran akan bebas dari pengaruh agama dan rencana ketatanegaraan politik. Titik berat usaha *Ksatrian Instituut* ialah pengajaran berdasarkan jiwa Hindia Belanda dan pendidikan ke arah manusia yang berfikir untuk meraih kemerdekaan Hindia Belanda. Sebagai persiapan tugas murid-murid di masa depan maka di sekolah dasar diajarkan bahasa Inggris mulai kelas lima. Gedung-gedung dibangun sesuai dengan tujuan kesehatan murid yang berada dibawah pengawasan dan perawatan dokter di yayasan *Ksatrian Instituut* sendiri. Para murid mendapat sarapan pagi yang bergizi di sekolah karena tak akan ada jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sakit.

Diakuinya sebagai badan hukum yayasan *Ksatrian Instituut* memperoleh kemajuan yang pesat dan dapat berkembang menjadi lima cabang antara lain *Nationale Lagere School I* dan *II* terdapat di Bandung, *Nationale Lagere School III* terdapat di Ciwidey, *Nationale Lagere School IV* terdapat di Cianjur, *Nationale Lagere School V* terdapat di Sukabumi.

Selain membuka cabang *Nationale Lagere School* (NLS) di berbagai tempat, yayasan *Ksatrian Instituut* mempunyai MMHS dengan bagian jurnalistik, perburuhan, sastra dan ekonomi. MMHS didirikan pada tahun 1932 bernama *Nationaal Handels Collegium*, tetapi hanya berjalan kurang lebih satu tahun pemerintah Hindia Belanda melarang nama sekolah tersebut dan kemudian diganti nama menjadi *Moderne Middelbare Handesal School* (MMHS) dengan alasan yang kurang jelas. Pendidikan di MMHS memakan waktu lima tahun yang terbagi atas tiga tahun sebagai pendidikan dasar dan dua tahun sebagai pendidikan keahlian yang meliputi jurusan jurnalistik, ekonomi dan pendidikan. Sekolah kejuruan ini dimaksudkan agar murid-murid mempunyai keahlian pada bidangnya. E.F.E. Douwes Dekker memakai semboyan "...*Door de will van onse Volk*" yang berarti "...karena kemauan rakyat" dan semboyan kedua "*Des Volks Toekomst gewijd*" yang berarti "mengabdikan masa depan rakyat". MMHS memberikan ilmu psikologi perdagangan yaitu untuk mengenal pelanggan dan pembeli, rahasia penjualan, jiwa dari reklame, dan keterampilan untuk membuat keuntungan dalam berdagang, merupakan pengetahuan yang dapat membawa Hindia Belanda ke arah kemajuan yang lebih baik.

Pada tanggal 1 Agustus 1935 *Ksatrian Instituut* membuka pendidikan untuk *Kweekschool* atau Sekolah Guru. Keinginan Douwes Dekker nampak jelas dalam salah satu pernyataannya: "Bila kelak sekolah-sekolah partikuler telah merebut masa depan pengajaran, seperti yang telah direbut sekarang maka Pemerintah akan meminta syarat lebih tinggi bagi guru-guru". Tujuan pendirian *Kweekschool* agar tercapai pengajar-pengajar yang baik dan spesialis, terbentuknya dengan segera komite guru-guru dan membuat basis yang lebih luas bagi perkembangan masyarakat Hindia Belanda. Mata pelajaran yang diberikan meliputi pengetahuan umum yang luas ditambah pengetahuan dagang serta diajarkan hubungan sosial dengan masyarakat. Terbukti, keterampilan lulusan *Kweekschool* tidak hanya pada pengajaran sebagai guru saja melainkan mempunyai keahlian lain yang bisa diterapkan pada dunia kerja selain guru.

Salah satu hal yang menarik dari *Ksatrian Instituut* ialah usaha untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam hal buku pelajaran. *Ksatrian Instituut* merencanakan dan berusaha agar dapat menerbitkan sendiri buku pelajaran untuk para murid. Buku-buku yang diterbitkan oleh *Ksatrian Instituut*, antara lain: 1. Sejarah Pertumbuhan Lalu Lintas Manusia di Dunia, 2. Buku-buku Bahasa, 3. Tata Bahasa Jepang yang dikerjakan oleh seorang Jepang dan guru dari Hindia Belanda yang bernama H. Nagashami B.A dan H. Sabirin dengan judul *Leerboek van de Japansche taal*, buku ini

ada tiga jilid yang digunakan dalam pembelajaran, 4. Sejarah Indonesia Kuno yang ditulis oleh E.F.E. Douwes Dekker dengan judul asli *Vluchtig Overzicht van de Geschiedenis van Indonesie, Deel I. Oudheid en Antieke, Deel II. Interval, Deel III. Moderne*. 5. Buku pelajaran Sejarah Dunia yang juga ditulis oleh E.F.E. Douwes Dekker dengan judul asli *Wereld Geschiedenis : Leerboek voor Middelbare Scholen in Indonesia I Oost Azie Bandung*.

Pada bulan Januari 1941 Douwes Dekker ditangkap dan ditahan di Ngawi. Pemerintah Hindia Belanda khawatir Douwes Dekker dijadikan kaki tangan Jepang. Tujuan Penangkapan Douwes Dekker sebenarnya dilatar belakangi adanya rencana pengiriman pelajar-pelajar tamatan *Ksatrian Instituut* ke Jepang, akan tetapi Douwes Dekker sama sekali tidak menyetujuinya karena Douwes Dekker tidak mendukung fasisme karena Douwes Dekker ingin membangunkan nasionalisme Asia. Pemerintah menuduhnya telah bekerjasama dengan Jepang. Tuduhan tersebut merupakan alasan yang dicari-cari untuk menangkapnya. Ia memang berencana untuk mengirim para pelajar lulusan *Ksatrian Instituut* ke Jepang, namun dia sama sekali tidak sepakat dengan ideologi fasisme. Tindakan penangkapan E.F.E. Douwes Dekker mengakibatkan kepemimpinan *Ksatrian Instituut* terombang ambing, sebab pada tahun 1940 Douwes Dekker sudah meninggalkan *Ksatrian Instituut* untuk bekerja sebagai pemegang buku untuk Jepang.

Meskipun hidup dalam tahanan, Douwes Dekker tidak lupa pada *Ksatrian Instituut*. Pada bulan Februari 1941 Douwes Dekker membuat surat kuasa yang isinya memberikan kekuasaan penuh kepada istrinya Johanna Petronella Mossel untuk memelihara kelangsungan hidup dan perkembangan *Ksatrian Instituut*. Jadi, dalam kurun waktu 1940-1941 kepemimpinan *Ksatrian Instituut* kosong. E.F.E. Douwes Dekker yang berada di rumah tahanan di Ngawi segera membuat surat kuasa kepada istrinya untuk mengelola *Ksatrian Instituut*.

E. KESIMPULAN

Adanya larangan tentang organisasi politik pada organisasi *Indische Partij* akhirnya berpindah bidang dalam perjuangannya, peralihan perjuangan dari politik ke ranah pendidikan. Pada ranah pendidikan E.F.E. Douwes Dekker dan Istrinya Petronella Mossel mendirikan *Ksatrian Instituut*. Perkembangan *Ksatrian Instituut* sangat baik dengan bukti dibukanya sekolah *Ksatrian Instituut* diberbagai tempat. Ketika Jepang datang pada tahun 1941, Douwes Dekker berhenti di *Ksatrian Instituut* untuk bekerja dengan Jepang karena memiliki kesamaan visi. Pada tahun 1941 Douwes Dekker ditangkap dan dimasukkan di penjara Ngawi sebagai tuduhan antek-antek Jepang. Perubahan arah perjuangan E. F. E. Douwes Dekker berpengaruh positif bagi bangsa Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

ARSIP

Onderwijzersvergunning Douwes Dekker
Het Geven van Onderwijs Door Douwes Dekker I
Het Geven van Onderwijs Door Douwes Dekker II

SURAT KABAR*De Express*

Sebelas Wartawan dinyatakan sebagai Perintis Pers Indonesia. Dalam harian Kompas. Selasa 21 Mei 1974

BUKU

Abdurrahman Surjomiharjo. 1979. *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi*. Jakarta: Yayasan Idayu.

A.K.Pringgodigdo. 1964. *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat

Douwes Dekker. E.F.E. 1908. *Het Boek van Siman den Javaan*. Amersfoort: P.M. Wink.

Kamajaya. 1982. *Tiga Bapak dan Pelopor Nasionalisme Pahlawan Nasional*. Yogyakarta: U.P. Indonesia

Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Margono Djojohadikusumo. 1975. *D.R. E.F.E. Douwes Dekker*. Jakarta: Bulan Bintang

Marwati Djoened, Nugroho N. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka

Mohammad Hatta. 1977. *Permulaan Pergerakan Nasional*. Jakarta: Idayu Press.

Pradipto Niwandhono. 2011. *Yang Ter(di)lupakan*. Yogyakarta: Djaman Baroe

Shiraishi, Takashi. 2005. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafitti Press

Slamet Muljana. 1986. *Kesadaran Nasional dari kolonialisme sampai kemerdekaan*. Jakarta: Inti Idayu Press

Sudiyo. 2002. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Rineka Cipta

Tashadi. 1981. *Dr.D.D.Setiabudhi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

MAJALAH*Het Tijdschrift***Makalah Seminar**

Didik Pradjoko. 2012. Peran kaum intelegensia dan pers pergerakan Nasional: Antara cita-cita kemandirian dan menuju kemandirian bangsa. *Makalah disampaikan dalam seminar Nasional dengan tema Pluralisme dalam gerakan Nasionalisme di Indonesia oleh Dirjen Kebudayaan, Museum Kebangkitan Nasional*. Jakarta 12 September 2012.